

Workshop pengelolaan lahan bekas tambang bagi aparaturn pemerintah Nagari Sikabau dan Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya

Adil Mubarak*, Syamsir, dan Aldri Frinaldi

Universitas Negeri Padang

* adilmubarak08@yahoo.co.id

Abstrak. 789 Hektare lahan di Kecamatan Pulau Punjung saat ini kondisinya sangat kritis khususnya di Nagari Sikabau dan Nagari Tebing Tinggi. Penyebab utamanya karena kegiatan eksploitasi sumber daya alam melalui aktivitas tambang emas rakyat sejak tahun 2005 yang tidak terbendung. Keadaan ini diperparah oleh kondisi masyarakat yang tidak peduli dan tidak mempunyai kesadaran terhadap pentingnya mengelola kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah nagari sebagai ujung tombak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga seperti kehilangan ide untuk memprakarsai satu tindakan konkret dalam menghadapi persoalan lingkungan di lahan bekas tambang tersebut. Penyebab utamanya adalah rendahnya pengetahuan dan keterampilan serta kapasitas aparaturn dalam mengelola lingkungan di Lahan bekas tambang. Melalui Workshop (pendidikan dan pelatihan) dengan metode pendekatan pelatihan partisipatif aparaturn telah memiliki pengetahuan, keahlian khusus bidang tatakelola lingkungan dan menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat nagari yang sadar lingkungan.

Kata kunci: pengelolaan lingkungan hidup; lahan bekas tambang; pemerintahan nagari

Abstract. 789 hectares of land in Pulau Punjung sub-district are currently in very critical condition, especially in Nagari Sikabau and Nagari Tebing Tinggi. The main cause is the exploitation of natural resources through the activities of the people's gold mining since 2005 which is unstoppable. This situation is exacerbated by the condition of people who do not care and do not have an awareness of the importance of managing environmental sustainability. Nagari government as the spearhead in environmental protection and management is also like losing the idea to initiate a concrete action in dealing with environmental problems in the former mining land. The main cause is the lack of knowledge and skills as well as the capacity of the apparatus in managing the environment on ex-mining land. Through workshops (education and training) with a participatory training approach method will give birth to apparatus who have knowledge, special expertise in the field of environmental management and become a main pillar in building environmentally conscious village communities.

Keywords: environmental management; former mining land; nagari government

To cite this article: Mubarak, A., Syamsir, & A. Frinaldi. 2019. *Workshop pengelolaan lahan bekas tambang bagi aparaturn pemerintah Nagari Sikabau dan Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya*. *Unri Conference Series: Community Engagement 1*: 113-120.

<https://doi.org/10.31258/unricsce.1.113-120>

© 2019 Authors

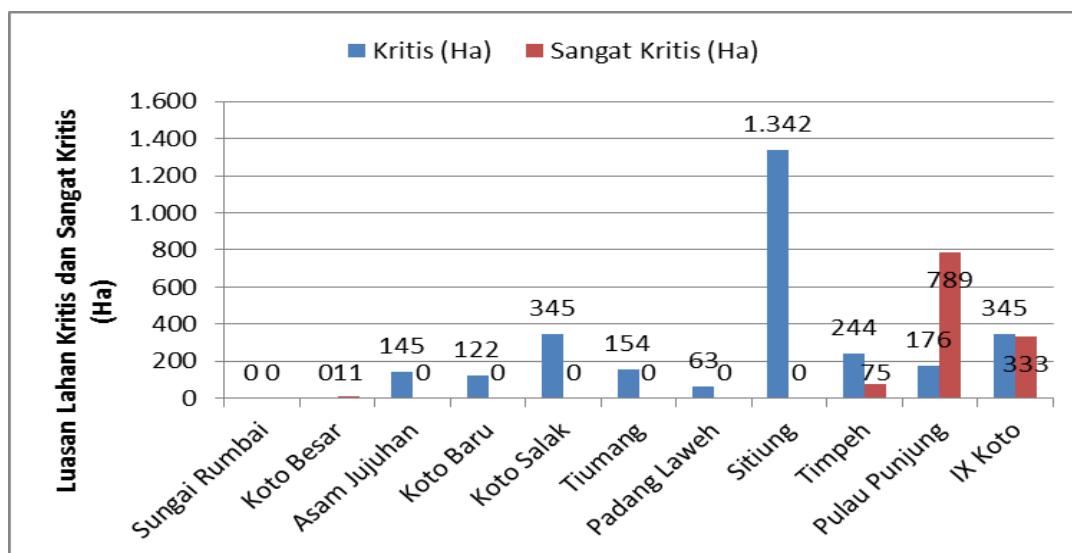
Peer-review under responsibility of the organizing committee of Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat 2019

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) pasal 28H mengamanatkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia, oleh karena itu Negara harus menjamin tersedianya lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut bagi warga negara agar kualitas dan kelangsungan hajat hidup warga negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Saat ini konsep pembangunan berwawasan lingkungan menjadi suatu kebutuhan penting bagi setiap bangsa dan negara yang menginginkan kelestarian sumberdaya alam. Oleh sebab itu, sumberdaya alam perlu dijaga dan dipertahankan untuk kelangsungan hidup manusia kini, maupun untuk generasi yang akan datang.

Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu kabupaten yang memiliki lahan akses terbuka sangat luas, dimana pada lahan akses terbuka tersebut telah berlangsung kegiatan pertambangan. Sejak tahun 2005 sampai tahun 2016 dikawasan sungai Nyunyo terdapat pertambangan emas rakyat tanpa izin, warga setempat yang merasa memiliki lahan dengan mendatangkan para pekerja dari luar daerah melakukan kegiatan pertambangan setiap hari di sepanjang aliran sungai Nyunyo. Saat ini hampir sebagian besar lahan di Kabupaten Dharmasraya yang terdapat diberbagai Nagari mengalami kondisi kritis, sehingga memaksa pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pelarangan dan bahkan menutup paksa kegiatan pertambangan emas masyarakat yang berdampak sangat luas terhadap pencemaran dan kualitas lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Dharmasraya saat ini mencatat luas lahan kritis berkisar seluas 4.144 Hektare, lahan tersebut terbagi menjadi 2.936 Hektare dengan status lahan kritis dan 1.342 Hektare dengan status lahan sangat kritis. Lahan ini tersebar hampir di seluruh kecamatan dengan persebaran yang berbeda. Untuk lebih rinci pada Gambar 1 terlihat grafik data terkait lahan kritis di Kabupaten Dharmasraya.



Gambar 1. Luasan Lahan Kritis di Kabupaten Dharmasraya

Sumber: Olahan Buku Data SLHD Kabupaten Dharmasraya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya

Kecamatan Pulau Punjung, seperti terlihat pada grafik di atas merupakan Kecamatan yang terpapar lahan kritis cukup luas dan lahan sangat kritis yang sangat luas, bahkan menjadi penyumbang lahan sangat kritis terluas dibandingkan Kecamatan yang lainnya. Dua Kenagarian yang terdapat di Kecamatan Pulau Punjung adalah Nagari Sikabau dan Nagari Tebing Tinggi. Berdasarkan wawancara dengan kedua Walinagari yaitu Bapak Sepriani Wali Nagari Kenagarian Tebing Tinggi dan Bapak Abdul Razak Wali Nagari Kenagarian Sikabau mengungkapkan bahwa di nagari yang mereka pimpin saat ini memang sedang terjadi kerusakan lingkungan terutama pada lahan-lahan bekas tambang. Pertambangan tanpa izin (PETI), yaitu tambang emas rakyat yang cukup meluas ketika itu membuat lahan di sekitar sungai menjadi rusak baik secara struktur maupun secara kualitas lahan.

Saat ini kondisi lahan bekas tambang telah menjadi pemicu utama menurunnya kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, pemerintah nagari belum dapat melakukan satu tindakan konkret untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi, hal ini disebabkan karena rendahnya kapasitas aparatur, rendahnya pengetahuan dan keahlian aparatur pemerintah nagari dalam tata kelola lingkungan khususnya pada lahan bekas tambang membuat tidak adanya motivasi dan keinginan secara serius dan terprogram untuk

memperbaiki kerusakan lahan tersebut. Oleh karena kegiatan pengabdian ini bertujuan agar melalui pendidikan dan pelatihan pengelolaan lingkungan aparatur diberikan pendidikan dan pelatihan, motivasi dan ide-ide yang ditampung melalui diskusi secara partisipatif sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi social, politik dan ekonomi di masing-masing nagari. Kegiatan ini juga bertujuan agar setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan pemerintah nagari melalui aparaturnya dapat menjadi ujung tombak dan pelopor utama dalam usaha pembangunan masyarakat sadar lingkungan khususnya di nagari mereka masing-masing melalui sebuah lembaga dengan program-program terukur.

MASALAH

Kondisi lahan sangat kritis akibat kegiatan pertambangan yang relatif luas di kedua nagari tersebut dan rendahnya pengetahuan, kesadaran, motivasi, serta keinginan dari masyarakat dan pemerintah nagari untuk memulai mencari format yang tepat untuk menghadapi masalah tersebut agar dampaknya tidak membahayakan bagi kelangsungan kehidupan masyarakat nagari terutama generasi selanjutnya maka diperlukan suatu usaha terstruktur yang dimulai dari penanaman kesadaran, peningkatan pengetahuan, dan memotivasi seluruh *stakeholder*. Oleh karena itu pada kegiatan pengabdian ini teridentifikasi beberapa masalah utama yang harus diselesaikan secara bersama-sama yaitu:

1. Perlunya mengintegrasikan program perbaikan lahan bekas tambang melalui reklamasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah melalui pelibatan pemerintah nagari secara leluasa melalui lembaga-lembaga yang ada di nagari seperti Badan Musyawarah Nagari, Kerapatan Adat Nagari, Bundo Kandung, Badan Usaha Milik Nagari agar aparatur pemerintahan nagari bisa berkolaborasi untuk tujuan program secara efektif.
2. Perlu dilakukan suatu kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan Nagari sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan ide, tindakan dan program terencana untuk mengatasi lahan kritis melalui pemulihan lingkungan lahan bekas tambang yang diprogramkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten dapat diserap dan di jalankan secara professional oleh pemerintah nagari.
3. Perlu adanya jejaring yang luas, dan membangun sinergi yang kuat dengan pihak lain seperti perguruan tinggi dan swasta untuk merwujudkan program pengembangan reklamasi seperti wisata. Tujuan lain agar terjalin kerjasama dalam berbagai hal termasuk sumberdaya manusia, sarana dan biaya.
4. Perlu secepatnya menyusun kerangka kerja restorasi lahan bekas tambang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, melalui kegiatan reklamasi atau revegetasi melalui sebuah kebijakan seperti peraturan nagari (perna).

METODE

Sesuai dengan tujuan dari kegiatan pengabdian ini yaitu untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah di Nagari Sikabau dan Nagari Tebing Tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam memperbaiki kualitas lingkungan pada lahan kritis atau lahan bekas tambang maka, sudah dirancang sebuah pendekatan melalui pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh melalui "*metode pendekatan pelatihan partisipatif*" yang didasarkan pada prinsip-prinsip pasipatori dengan menekankan kepada asas peran serta seluruh peserta pelatihan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Tahap pelatihan ini dimulai dengan penetapan tujuan pelatihan kemudian diikuti dengan pengisian materi pelatihan sehingga memberikan suatu hasil yang diharapkan. Namun, selain itu ada beberapa teknik yang juga digunakan dalam pelatihan ini, antara lain adalah sebagai berikut:

1. *Permainan*. Dilakukan untuk membangun suasana agar selalu segar dalam pelatihan, mengatasi kejenuhan dan menumbuhkan kesadaran baru terhadap pemahaman konsep-konsep ekologi restorasi dan restorasi lahan bekas tambang melalui reklamasi dan revegetasi.
2. *Studi Kasus*. Dilakukan untuk meninjau kasus-kasus yang dihadapi peserta pelatihan di lapangan untuk membahas cara memecahkan masalah yang sering dihadapinya. Kemudian dijabarkan dalam suatu kerangka kerja yang disebut sebagai "daur belajar dari pengalaman yang distrukturkan" (*Structure experiential learning cycle*). Dengan melalui empat langkah (Setiana, 2004): (1) melakukan, suatu tindakan sebagai pengalaman langsung/nyata; (2) mengungkapkan, uraian kejadian tersebut sebagai fakta/data; (3) menganalisis, fakta/data tersebut; (4) menyimpulkan, hasil analisis tersebut sebagai pelajaran/pengetahuan baru.

3. *Praktek dan Peragaan*. Merupakan proses salah satu indikator kemampuan prosedural (keterampilan) peserta latihan dalam menyerap materi yang diberikan. Praktek ini dilaksanakan untuk menyiapkan rencana program aksi dalam kegiatan restorasi lahan bekas tambang.
4. *Brainstorming*. Merupakan proses pengumpulan gagasan bersama-sama dan menjadikan suatu inventarisasi terhadap gagasan yang dikemukakan. *Brainstorming* dilaksanakan untuk materi peningkatan kemampuan perumusan peraturan nagari yang dilakukan oleh aparat nagari dan masyarakat.
5. *Diskusi*. Merupakan proses yang dilakukan untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi dalam merumuskan program restorasi lahan bekas tambang
6. *Ceramah*. Dilakukan untuk memberikan materi yang telah disusun berdasarkan silabus terkait konsep tugas dan fungsi pemerintah, konsep pengelolaan lingkungan hidup, ekologi restorasi, program restorasi lahan bekas tambang.

PEMBAHASAN

Pemerintah menjadi ujung tombak yang memiliki tugas dan fungsi hakiki yang sangat strategis. Ada 2 (dua) fungsi yaitu fungsi primer merupakan fungsi pokok pemerintah yang tidak akan berhenti bahkan cenderung akan meningkat volumenya jika kondisi masyarakat juga semakin modern yaitu yang berhubungan dengan pemberian pelayanan. Kemudian fungsi sekunder yaitu fungsi pemerintah yang berhubungan dengan pembangunan, pemberdayaan, pengelolaan, pengaturan, keamanan dan lainnya (Mubarak, 2014).

Mengingat begitu strategisnya fungsi pemerintah maka, tentu dibutuhkan aparatur pemerintah yang handal yaitu aparatur pemerintah yang memiliki pengetahuan, kapasitas, kapabilitas dan keterampilan yang baik agar setiap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Salah satu aspek yang perlu dipahami dan dikuasai oleh aparatur pemerintah adalah aspek yang berhubungan dengan lingkungan hidup, UUD 1945 mengamanatkan agar pemerintah harus menjadi pelopor dalam pengelolaan lingkungan hidup supaya tercipta lingkungan hidup yang baik, untuk itu aparatur pemerintah harus memiliki *mindset* yang berorientasi pada kelestarian lingkungan.

Melalui *workshop* diberikan pemahaman melalui kegiatan penyuluhan oleh para pakar tentang urgensi lahan bagi kelangsungan kehidupan, konsep pembangunan berwawasan lingkungan (*sustainable development*), lahan bekas tambang dan dampaknya, upaya perbaikan lahan bekas tambang melalui ekologi restorasi dalam bentuk revegetasi, reklamasi dan bentuk lainnya, juga dilakukan pelatihan yang meliputi pelatihan pembuatan kebijakan bidang lingkungan hidup khususnya perbaikan lahan bekas tambang, dan simulasi penanaman bibit untuk memulai proses pra reklamasi di sebagian lahan yang telah dipilih.

Materi juga mentransformasi konsep-konsep penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti konsep *eco efisien*, IPAL, manajemen daur ulang, reklamasi *tailing*, restorasi ekosistem, *Green product*, *community-ecologi empowerment*.

Tabel 1. Materi *workshop* Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Aparatur Pemerintah Nagari Sikabau dan Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Dalam Perbaikan Lahan Bekas Tambang

No	Materi	Sub Materi	Pemateri	Capaian
1	Lahan dan Sumber Daya Alam (<i>land and natural resources</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hakikat dan urgensi lahan / tanah 2. Kualitas lahan dan fenomena kerusakan lahan 3. Sumberdaya alam dan pemanfaatannya 	Adil Mubarak, S.IP,M.Si	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran Aparatur Pemerintah untuk membuat rencana strategis tentang lahan dan pemanfaatan sumber daya alam.
2	Pembangunan Berwawasan Lingkungan (<i>sustainable development</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian pembangunan berwawasan lingkungan. 2. Pendekatan-pendekatan dalam <i>sustainable development</i>. 3. Kapita selekta dalam pembangunan berkelanjutan 	Aldri Frinaldi, SH, M.HUM, Ph.D	Meningkatkan pemahaman Aparatur terhadap konsep <i>sustainable development</i> dan mampu membuat perencanaan pembangunan melalui musrembang yang berorientasi pada pembangunan berwawasan lingkungan.
3	Lahan Bekas Tambang dan Restorasi Lingkungan Lahan Bekas Tambang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi lahan setelah pertambangan 2. Dampak lingkungan diwilayah bekas tambang 3. Restorasi lingkungan 4. Revegetasi dan Reklamasi 	Dinas Lingkungan Hidup dan Balai Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	Meningkatkan Pemahaman Aparatur terkait Kondisi dan dampak lingkungan lahan bekas tambang, serta mengetahui konsep

No	Materi	Sub Materi	Pemateri	Capaian
				restorasi lingkungan melalui reklamasi.
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan SDM 2. Pengembangan Organisasi melalui pendekatan <i>good government</i> 3. Pengembangan model kebijakan dalam pengelolaan lingkungan 	Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D	Meningkatkan kapasitas SDM dan Organisasi melalui pemanfaatan sumber-sumber yang dimiliki oleh Nagari.
5	Simulasi, Praktek dan Peraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>legal drafting</i> 2. SOP 3. Revegetasi 4. Reklamasi 	Dra. Jumiaty M.Si	Meningkatkan keterampilan aparaturnya pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan kongrit dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi

Pemulihan lahan kritis akibat tambang merupakan suatu pekerjaan yang cukup serius karena dilahan bekas tambang di Kecamatan Pulau Punjung berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama peneliti dari ITB pada tahun 2018 di Kabupaten Dharmasraya jika dilihat dari konsentrasi mercury yang beredar maka rata-rata hampir semua lahan bekas tambang terpapar mercury dan tergolong lahan yang dibawah baku mutu (Materi Pelatihan oleh Kepala Dinas LH Kabupaten Dharmasraya). Sementara itu hasil penelitian Kementerian Kesehatan RI, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit bahwa dari 15 air sumur yang dijadikan sampel terdapat 14 sumur (93,33%) memiliki kadar mercury melebihi nilai mabang batas, dari 36 orang responden terdapat 34 orang responden (94,44 %) mengkonsumsi air sumur yang terpapar mercury, dan tentunya akan berdampak fatal bagi kesehatan masyarakat sekitar lahan bekas tambang tersebut.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan satu upaya terukur dalam memperbaiki lahan bekas tambang yaitu melalui reklamasi lahan bekas tambang dan revegetasi. Reklamasi adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan kembali lahan yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan kemampuannya. Revegetasi adalah usaha atau kegiatan penanaman kembali lahan bekas tambang. (PP RI No. 76 Tahun 2008). Saat ini reklamasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui kementerian LHK seluas 3,8 H tahun 2018 dan diteruskan oleh Pemerintah Daerah 4,5 H pada tahun 2019 ini sedang dalam tahap pengerjaan. Keduanya berlokasi di Nagari Tebing Tinggi.



Gambar 2. Lokasi Lahan Bekas Tambang yang di-Reklamasi

Melalui observasi ke lokasi lahan bekas tambang dalam kegiatan ini dapat pula diidentifikasi secara menyeluruh keadaan lahan dan perlakuan apa yang dapat diterapkan untuk memulai upaya pemerintah dengan masyarakat dalam memperbaiki lingkungan dan lahan bekas tambang agar bisa dimanfaatkan sebagai lahan produktif. Fakta-fakta di lapangan akhirnya menjadi acuan utama yang dilakaukan dalam pelatihan bersama para aparaturnya nagari yaitu wali nagari, sekretaris nagari dan semua kelapa jorong di kedua nagari. Kondisi lahan bekas tambang yang telah di reklamasi dan revegetasi tidak sesuai dengan harapan dan tujuan yang sebenarnya. Hampir 70% lahan yang ditanami bambu gagal tumbuh, seluruh penunjang lahan reklamasi dan revegetasi tidak berfungsi. Masyarakat juga tidak begitu peduli dengan proyek ini, sehingga secara umum manfaat reklamasi dan revegetasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten belum efektif dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, tim pengabdian akhirnya mengacu pada hasil observasi dan dialog bersama masyarakat serta pemerintah nagari mengarahkan untuk membangun sebuah misi bersama agar proyek reklamasi yang telah ada dimaksimalkan melalui usaha pengembangan pariwisata nagari yang dikelola oleh nagari tersebut, kita mendorong pemerintah daerah untuk memberikan keleluasaan yang luas kepada pemerintah nagari melalui BUM Nag mengelola lahan secara professional dan tentunya dapat menghasilkan pendapatan bagi nagari.



Gambar 3. Peserta dan Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Lahan Bekas Tambang

Ada tiga hal penting yang berhasil dirumuskan dalam kegiatan pelatihan ini yang terhimpun dalam bentuk konsep dan arah kebijakan yaitu pertama, memperkuat instrument pemerintah nagari melalui kebijakan. Pemerintah nagari harus merumuskan satu peraturan nagari yang mengatur secara khusus tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan lahan bekas tambang. Untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah nagari dalam pembentukan perundangan maka, telah dilatih seluruh peserta untuk membuat satu naskah kebijakan dengan memberikan pemahaman terkait konsep dan teknik legal drafting. Peraturan Nagari merupakan satu kebutuhan bagi pemerintah untuk menjadi landasan hukum yang kuat dalam merealisasikan tujuan-tujuan dari reklamasi yang telah digulirkan, saat ini pemerintah dalam posisi yang lemah karena tidak memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Rumusan kedua adalah, pemerintah nagari diarahkan untuk membuat *master plan* nagari secara konferhensif terutama terkait dengan potensi lahan yaitu daya dukung dan daya tampung lahan serta peta pemanfaatan lahan yang ada dikedua nagari. *Master plan* nagari nantinya dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan secara bertahap. Untuk hal ini, tim pengabdian memberikan materi untuk memperkaya pengetahuan aparatur tentang urgensi perencanaan dalam pembangunan nagari, dan merekomendasikan satu kegiatan khusus untuk memfasilitasi berbagai pelatihan dalam membuat *master plan* nagari.

Ketiga, pemerintah nagari harus membangun sinergi yang kuat dengan berbagai pihak atau *stakeholder*, baik dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, maupun pihak lain diluar pemerintah seperti LSM dan pihak swasta. Sinergi juga harus dibangun dengan berbagai perguruan tinggi dalam mengadvokasi implementasi program, untuk merumuskan strategi, menganalisis situasi dan bahkan kerja sama dalam hal pengembangan sumber daya manusi serta tidak tertutup kemungkinan berkolaborasi dalam pembiayaan. Pada pelatihan ini pihak Universitas Negeri Padang telah membuka ruang seluas mungkin kepada pemerintah daerah dan pemerintah nagari khususnya nagari Sikabau dan Tebing Tinggi untuk membuat kesepakatan dalam bentuk MoU yang bisa ditindaklanjuti melalui program-program yang terukur, seperti bina manusia, bina lingkungan dan bina lingkungan. Melalui tiga arah kebijakan yang direkomendasikan ini dan pendalaman materi dalam kegiatan pelatihan, aparatur telah memilki modal pengetahuan dan motivasi yang tinggi untuk mulai memikirkan bagaimana tata kelola lingkungan khususnya lahan bekas tambang yang relative luas dapat menjadi lahan produktif yang bermanfaat.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah mengimplementasikan satu konsep pemulihan lahan akses terbuka di lahan bekas tambang yang telah di reklamasi dan revegetasi dengan konsep *Eco-Edu Green* yaitu membangun satu kawasa hijau yang ramah lingkungan dan dimanfaatkan untuk pendidikan dengan cara membuat taman bambu. Tetapi konsep ini sepertinya belum terealisasi secara baik, hasil survey tim ke lokasi dapat disimpulkan bahwa keadaan sat ini sangat jauh dari harapan, seperti yang telah diungkap diatas bahwa

lebih dari 70% bamboo yang ditanam mengalami gagal tumbuh. Untuk merevitalisasi Dharmasraya *Eco-Edu Green Park* telah dirumuskan satu konsep pengelolaan wisata nagari berbasis lingkungan.

Layaknya tempat wisata maka, perlu ada manajemen pembangunan yang terintegrasi sehingga terpenuhi prasyarat wisata, paling tidak ada 3 hal yang direkomendasikan dalam mewujudkan nagari wisata berbasis lingkungan agar konsep yang sudah ada ini dapat berkembang secara baik yaitu bagaimana mewujudkan destinasi wisata yang dapat menjawab tiga pertanyaan utama yaitu sebagai tempat wisata apa yang akan dilihat, apa yang akan dikunjungi dan apa yang dibeli. Selain itu, perlu membangun infrastruktur wisata yaitu akses, sarana dan prasarana. Dilain hal, kesiapan masyarakat juga dibutuhkan untuk menjadi masyarakat yang ramah lingkungan dan sadar wisata. Pada kegiatan pelatihan ini, telah berhasil mendorong pemerintah nagari untuk segera membentuk kelompok masyarakat sadar lingkungan dan kelompok masyarakat sadar wisata yang dimulai dari basis sekolah-sekolah yang dipelopori oleh aparatur nagari yang telah mengikuti kegiatan pelatihan ini.



Gambar 4. Kondisi Dharmasraya Eco-Edu Green Park saat ini

Workshop pengelolaan lingkungan hidup bagi aparatur pemerintah nagari pada lahan bekas tambang di dua nagari ini telah berhasil mengembangkan beberapa hal yaitu peningkatan kapasitas melalui pengayaan pengetahuan dan keterampilan tentang tata kelola lingkungan khususnya pada lahan bekas tambang dengan cara reklamasi dan revegetasi, tercapainya kesepakatan yang akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU antara pemerintah daerah dengan Universitas Negeri Padang, membuat *master plan* nagari dan dijadikan acuan untuk mengelola potensi nagari khususnya potensi lahan, membangun sinergi dengan perguruan tinggi, LSM, swasta dan pihak lain untuk pengembangan pariwisata nagari, dan terbentuknya kelompok sadar lingkungan serta kelompok sadar wisata berbasis sekolah yang dipelopori oleh aparatur pemerintah nagari.

KESIMPULAN

Kegiatan *workshop* pengelolaan lingkungan hidup bagi aparatur pemerintah nagari yang diikuti oleh wali nagari, sekretaris nagari dan seluruh kepala jorong dari kedua nagari yaitu nagari Sikabau dan Tebing Tinggi secara bertahap telah dilakukan dengan baik melalui penyampaian materi-materi pokok tentang tatakelola lingkungan, reklamasi dan revegetasi, pembentukan kebijakan, dan membangun kapasitas SDM serta lembaga oleh para pakar dari perguruan tinggi dan dinas lingkungan hidup.

Dengan pendekatan partisipasi para peserta secara terbuka menyampaikan persoalan yang dihadapi, kebutuhan yang harus dipenuhi dan mencari secara bersama-sama format ideal pengelolaan lahan yang telah direklamasi dan direvegetasi dimana saat ini menghadapi banyak kendala, terutama dalam pengembangan konsep eco-edu green park yang telah direncanakan.

Tiga rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti yang telah dirumuskan peserta pelatihan akan diadvokasi yaitu, menyiapkan proposal kerjasama dengan Universitas Negeri Padang sebagai nagari binaan, menyiapkan *master plan* nagari, dan mengerakan kelompok sadar lingkungan serta kelompok sadar wisata.

DAFTAR PUSTAKA

Bradshaw, A. D. 1993. The Restoration of Mined Land. Conservation in Perspective Edited by A. Warren and F.B. Goldsmith, John Wiley and Sons Ltd.

- Grinwald, C., L. R. Iverson, and D. B. Szafoni. Abandoned Mines in Illinois and North Dakota Rehabilitation Damage Ecosystem Vol I edited by John Cairas Jr. Florida: CRC Press Inc. Bucaraton.
- Hidayat, H., J. Haba, R. Siburian. 2011. Politik Ekologi Pengelolaan Taman Nasional Era Otda. Jakarta: LIPI Press bekerja sama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hidayat, H. 2015. Pengelolaan Hutan Lestari. Partisipasi, Kolaborasi dan Konflik. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Husin, S. 2009. Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manik, K. E. S. 2018. Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mubarak, A. 2014. Peran Ormas dalam Menjalankan Fungsi Pemerintah Bidang Pemberdayaan. In: Seminar Nasional UT 2014, 23 Oktober 2014, Universitas Terbuka Convention Center (UTCC).
- Munir, M., dan RR. D. N. Setyowati. 2017. Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang di Jambi, Bangka, dan Kalimantan Selatan. *Jurnal Klorofil* 1(1): 11-16.
- Rahmawaty. 2002. Restorasi Lahan Bekas Tambang Berdasarkan Kaidah Ekologi. Medan: Usu Digital Library
- Supramoto, G. 2012. Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.